

ANALISIS IMPLEMENTASI E-BUDGETING DALAM Mendukung TRANSPARANSI PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Sulistyo Arini¹, Suci Nasehati²

¹ Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tidar
e-mail: Sulistyoarini1976@gmail.com

² Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tidar
e-mail: sucinasehati@untidar.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 23 September 2022

Received in revised form 27 September 2022

Accepted 20 Oktober 2022

Available online 22 Oktober 2022

ABSTRACT

The implementation of E-Budgeting in financial transparency is one of the advancements in a sound financial governance system. In the context of implementing E-Budgeting and increasing budget transparency, which is the main goal of the Surakarta City Government. Data collection methods include reading the Surabaya city government website and reading relevant literature. The results show that E-Budgeting plays a role in promoting budget transparency in Surakarta City. The Surakarta City Government has implemented budget transparency website services, such as e-budget.surakarta.go.id and ppid.surakarta.go.id, as part of its commitment to open government. The Surakarta City Government also offers ULAS as a way to respond to public expectations and complaints. The Supreme Audit Agency has recognized Surakarta City for twelve consecutive years for excellent financial management by awarding them the title of Unqualified. Publicizing the planning, E-Budgeting, and program activities of the City of Surakarta is one example of the government's commitment to transparency.

Keywords: Implementation, E-Budgeting, Budget transparency

Abstrak

Implementasi *E-Budgeting* dalam transparansi keuangan merupakan salah satu kemajuan sistem tata kelola keuangan yang sehat. Dalam rangka implementasi *E-budgeting* dan peningkatan transparansi anggaran yang menjadi tujuan utama Pemerintah Kota Surakarta. Metode pengumpulan data meliputi membaca website pemerintah kota Surabaya dan membaca literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *E-Budgeting* berperan dalam mendorong transparansi anggaran di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta telah mengimplementasikan layanan website transparansi anggaran, seperti e-budget.surakarta.go.id dan ppid.surakarta.go.id, sebagai bagian dari komitmennya terhadap open government. Pemerintah Kota Surakarta juga menawarkan ULAS sebagai salah satu cara untuk menjawab harapan dan keluhan masyarakat. Badan Pemeriksa Keuangan telah mengakui Kota Surakarta selama dua

Received September 23, 2022; Revised September 27, 2022; Accepted Oktober 20, 2022

belas tahun berturut-turut dalam pengelolaan keuangan yang sangat baik dengan memberikan mereka predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Mempublikasikan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan program Kota Surakarta merupakan salah satu contoh komitmen transparansi pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi, *E-Budgeting*, Transparansi anggaran

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi pada akhirnya mengubah struktur organisasi serta hubungan sosial dan masyarakat. Hal ini berdampak pada aktivitas sehari-hari masyarakat di berbagai bidang. Sektor publik yang terdapat dalam organisasi pemerintah adalah salah satunya. Tujuan utama reformasi keuangan daerah adalah untuk mewujudkan akuntabilitas publik melalui pengelolaan keuangan publik yang lebih terbuka dan efisien berdasarkan konsep value for money (Mardiasmo, 2009). Perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel kepada konstituennya dan transparan akan menjadi tolak ukur yang baik bagi keberhasilan reformasi keuangan daerah Indonesia. Good Governance adalah upaya untuk memperbaiki keadaan suatu negara dengan mendapatkan kembali kepercayaan warganya terhadap lembaga pemerintahannya. Permasalahannya masyarakat tidak memiliki gambaran yang utuh tentang birokrasi, yang bermasalah karena birokrasi harus dikelola oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat.

Untuk membangun pemerintahan yang baik, sangat penting untuk mengetahui prinsip-prinsip menyeluruhnya, seperti desakan demokrasi bahwa semua kekuatan politik berada di tangan dan pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat, dan prinsip keadilan dan janji kesetaraan sosial untuk memfasilitasi implementasi kebijakan progresif yang menguntungkan sebagian besar penduduk. Struktur organisasi dan dinamika antarpribadi merupakan dua bidang yang mau tidak mau dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Akibatnya, rutinitas sehari-hari masyarakat di berbagai bidang harus beradaptasi. Pelayanan publik, seperti yang diberikan oleh berbagai instansi pemerintah, adalah salah satu contohnya. Pengembangan model layanan publik elektronik dimungkinkan oleh kemajuan teknologi komputasi dan komunikasi (E-government).

Salah satu inovasi good governance dan contoh pemanfaatan teknologi informasi, penggunaan program komputer berbasis web untuk mengefektifkan penyusunan APBD saat ini sedang dilaksanakan. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dalam pengelolaan anggaran daerah, atau bisa juga berarti penganggaran elektronik, yang merupakan metode populer untuk melacak uang. Surakarta merupakan salah satu kota yang sedang berproses menjadi Smart City dengan menerapkan teknologi yang semakin maju, seperti aplikasi Solo Destination. Saat ini, Surakarta merupakan salah satu kota yang menggunakan *E-budgeting* untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap belanja pemerintah dengan membuat belanja lebih transparan. Website ini dikelola oleh Badan Litbang Daerah, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Ini merupakan langkah awal untuk memfasilitasi open data di instansi pemerintah yang responsif dan akuntabel.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Electronic Budgeting

Electronic Budgeting (E-Budgeting) merupakan sistem/aplikasi penganggaran berbasis web yang digunakan untuk mempermudah proses penganggaran daerah (Rahman et al., 2019). Penting untuk menerapkan e-budgeting di tingkat lokal untuk meningkatkan transparansi pembangunan ekonomi lokal (Nurwanda & Badriah, 2020). Hal ini karena dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pejabat pemerintah (eksekutif dan legislatif). Dalam hal pengembangan bisnis yang efektif, semuanya bermuara pada peningkatan transparansi dalam transaksi bisnis di masa depan.

Sistem penganggaran elektronik memainkan peran penting dalam penganggaran (Mensah, 2019). Sistem mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses penganggaran karena dilakukan secara online dan dapat diakses dimana saja, namun efisiensi waktu dapat tercapai jika penggunaan sistem dapat dilakukan dengan benar oleh penggunaannya (Zahri & Kusumastuti, 2020) Penganggaran elektronik berperan penting dalam penganggaran sektor publik yang dilakukan oleh departemen pemerintah dan merupakan bentuk nyata pengelolaan keuangan daerah yang transparan kepada publik. Komunitas (Gamayuni & Hendrawati, 2020).

2.2. E-Government

Salah satu jenis e-government adalah portal pengaduan online berbasis web. Proses Penyelesaian tugas harus dikategorikan sehingga selesai tepat waktu dan akurat (Nugroho dkk. 2020). e-government menggunakan media teknologi informasi dan Komunikasi sebagai sarana publik, persyaratan keterbukaan informasi Pelayanan Publik Terintegrasi Berbasis Internet di Birokrasi (Habibie, 2019) (Maulana dkk. 2020). Menurut (Zaliluddin et al., 2020) "e-government adalah Memanfaatkan TIK untuk Pemerintah Lebih fokus pada efisiensi dan efektivitas biaya, daripada objek fasilitas layanan Massa, biarkan pemerintah lebih bertanggung jawab kepada rakyat."

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Surakarta khususnya pada instansi yang berkaitan langsung dengan implementasi E budgeting. Yaitu, BPPKAD, Bappeda dan Diskominfo SP. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi pada situs website pemerintah kota surakarta dan studi kepustakaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi E-Budgeting Pada Pemerintah Kota Surakarta

Riset BPPKAD, Bappeda, dan Diskominfo SP menunjukkan sumber daya manusia yang memadai untuk implementasi *E-Budgeting* di Pemerintah Kota Surakarta. Namun, Diskominfo SP masih dianggap kurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada. Ini tidak cukup karena memberikan tekanan yang tidak semestinya pada sumber daya yang sudah terbebani dan menghambat pelaksanaan kebijakan yang efektif. Anggota staf yang bertugas melaksanakan implementasi kebijakan, misalnya, harus dipilih secara cermat dengan mempertimbangkan kompetensi dan profesionalisme. Implementasi kebijakan dapat didukung oleh sumber daya manusia dan moneter. Tabel di bawah ini merinci inisiatif E-Budgeting Pemerintah Kota Surakarta terhadap dana SP Diskominfo yang digunakan untuk fasilitas pendukung, sebagaimana tercermin dalam dokumen pelaksanaan anggaran aparatur daerah (DPA PD) tahun anggaran 2020-2021:

Tabel 1.1
Besaran Dana Implementasi E-Budgeting

RINCIAN	2020	2021
Belanja Service Rutin Koneksi, database, server jaringan terintegrasi	198.000.000,00	198.000.000,00
Update Rutin Budgeting	192.000.000,00	192.000.000,00

Sumber : Website BPPKAD Kota Surakarta

Hasil di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta memiliki dana yang cukup untuk menjalankan dan menjalankan program E budgeting, namun belum dalam kondisi terbaik karena kurangnya sumber daya manusia. Pemerintah kota Surakarta, bagaimanapun, telah memberikan komitmen sumber daya yang signifikan untuk pelaksanaan anggaran E yang sedang berlangsung.

Di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, struktur birokrasi penganggaran elektronik dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Bappeda, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta (Diskominfo SP). Ini adalah tanggung jawab masing-masing departemen untuk melaksanakan bagian mereka dari penganggaran E. Bappeda Kota Surakarta bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan sampai dengan tahap perencanaan anggaran KUAPPAS. Dengan menerapkan SIMDA Keuangan pada DPA, Akuntabilitas, dan administrasi, BPPKAD Surakarta berkontribusi pada sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif. Selain itu, penganggaran E mengandalkan infrastruktur yang disediakan oleh Diskominfo SP Surakarta. Dalam hal ini, BPPKAD, Bappeda, dan Diskominfo SP semuanya diberi peran tertentu sebagai akibat adanya pembagian kerja. Karena setiap lembaga yang bertanggung jawab memiliki tanggung jawab sendiri, jelas bahwa setiap orang melakukan bagian mereka.

4.2 E Budgeting Terhadap Transparansi Pemerintah Kota Surakarta

Transparansi penganggaran elektronik menempatkan premium pada transparansi keuangan di tingkat daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010, yang menjabarkan Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah kota Surakarta merupakan salah satu yang telah menggunakan E-budgeting dan telah diakui oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selama sepuluh tahun berjalan. Penghargaan yang diterimanya adalah penghargaan WTP (WTP). Predikat WTP ini patut dibanggakan, karena menyampaikan gagasan bahwa roda pemerintahan telah dikelola secara transparan dan jujur, bahkan mungkin bebas dari korupsi. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan semangat reformasi, dengan harapan ini akan mengarah pada kebijakan partisipatif, khususnya di tingkat lokal. Petunjuk teknis pelaksanaan tahapan musyawarah perencanaan pembangunan setelah pelaksanaan pembangunan partisipatif telah diatur dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kota Surakarta Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Musrenbang tahunan yang diselenggarakan oleh Bappeda menyediakan forum bagi warga untuk menyuarakan keprihatinan dan menentukan proyek mana yang harus menerima pendanaan.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Kehadiran Peserta Musrenbang RKPD Tahun 2020 Kota Surakarta

UNSUR	JUMLAH UNDANGAN	JUMLAH KEHADIRAN
Pimpinan Pemerintah Kota	9	9
Muspida	5	2
DPRD	45	45
Provinsi	2	1
Bupati Wilayah Sekitar	3	3
Delegasi Musrenbangcam	55	46
Delegasi DKT	88	57
Perangkat Daerah	45	45
LSM	6	5
Perguruan Tinggi	4	1
Organisasi Masyarakat dan Pemuda	9	5
Komunitas Sektoral	6	3
Tokoh Agama	7	3
Budayawan	5	3
LPMK	54	40
Organisasi Profesi	6	3
Organisasi Perempuan	2	1
Perwakilan Partai Politik	6	1
TPKK	5	2
TKSK	50	21
Koordinator Kotaku	1	1
Perwakilan Fasilitator Kelurahan	8	6
Forum Anak	6	6
Instansi Vertikal	7	3
TP PKK	6	4
Pelaku Usaha	13	13
Pers	2	2
Tokoh Masyarakat	7	7
Koordinator Kotaku	1	2
Total	463	340
Persentase Kehadiran		73,43%

Sumber : Website Resmi Bappeda

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas, 73,43 persen undangan Musrenbang justru hadir. Akses bagi publik untuk menyuarakan pendapatnya merupakan bagian penting dalam mewujudkan transparansi. APBD Surakarta dapat dilihat oleh publik di situs web transparansi yang disediakan oleh pemerintah kota.

4.2.1 Website <https://e-budget.surakarta.go.id/web/>

Informasi anggaran tersedia untuk umum melalui alat penganggaran online ini. Jelas bahwa masyarakat memiliki akses mudah ke anggaran daerah melalui website ini. Website ini memberikan informasi anggaran pada tahap perencanaan anggaran. Mulai dari Data Musrenbang, Data Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perencanaan KUA/PPAS, Perencanaan Penetapan Kinerja, Perencanaan KUA/PPAS Perubahan, Evaluasi Hasil Renja, Perbandingan KUA/PPAS dan Anggaran Penetapan hingga Pagu Perubahan. Dalam menu Perbandingan KUA/PPAS dan Anggaran Penetapan juga memberikan informasi anggaran setiap OPD hingga detail rencana program kegiatan dan rencana belanja. United Nations Development Programme dalam Adisasmita (2011:24) menyebutkan bahwa transparansi sebagai salah satu prinsip good governance dibangun berdasarkan keeluasaan aliran informasi yang dapat diakses oleh orang yang membutuhkan secara langsung, harus sederhana agar mudah dipahami dan pelacakan informasi. E-Budgeting sangat penting untuk membuat anggaran dapat diakses sepenuhnya oleh masyarakat umum, khususnya warga Kota Surakarta.

Konten situs terkenal karena kesederhanaannya yang ramah pembaca dan kejelasan informasinya. Masih ada informasi yang disembunyikan di website ini. Misalnya, data musrenbang kelurahan 2017 tidak memuat informasi sama sekali, sedangkan data tahun anggaran 2018, 2019, 2020, dan 2021 ditampilkan secara mencolok. Situs web ini juga dimaksudkan untuk masyarakat umum, tetapi beberapa pengunjung mungkin tidak memiliki literasi teknologi yang diperlukan karena kurangnya pendidikan.

4.2.2 Website ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) <https://ulas.surakarta.go.id/>

Aplikasi Solo Destination menyertakan ULAS sebagai salah satu fiturnya. Berkat ULAS, warga Kota Surakarta akan lebih mudah berbagi harapan, keprihatinan, dan gagasan dengan pemerintah kota. Ini menawarkan 55 kategori pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Total pengaduan yang masuk sebanyak 2.786 pengaduan, dan total 2.781 pengaduan yang mendapat tanggapan hingga hitungan saat ini. Kemampuan publik untuk melaporkan apa pun sudah dikenal luas. Pengguna dapat mengajukan keluhan dengan ULAS, melampirkan foto dan menunjukkan dengan tepat lokasi mereka; OPD yang sesuai kemudian akan merespons dalam tiga kali kerangka waktu standar 24 jam. Fungsi ULAS ini dapat dianggap sebagai tambahan yang banyak diminta ke sistem. Sayangnya, tidak semua orang di Kota Surakarta memiliki akses ke smartphone, bahkan lebih sedikit yang mengunduh aplikasi Solo Destination. Sumber daya yang terbatas dari beberapa komunitas mungkin menjadi penyebab hal ini.

4.2.3 Website <https://ppid.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Surakarta dalam rangka pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik. Pengguna dapat menggunakan aturan ini sebagai kerangka kerja untuk mengakses dan memanfaatkan data yang tersedia untuk umum. PPID memungkinkan masyarakat dengan cepat dan mudah mengajukan permintaan rincian APBD yang telah disahkan. Agar warga mengetahui bagaimana uang pajak mereka dibelanjakan oleh Kota Surakarta. Ini adalah website Pemkot Surakarta yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan warga terhadap Pemkotnya. Anggaran dan pelaksanaannya diumumkan pada website [E-budgeting.surakarta.go.id](https://e-budgeting.surakarta.go.id/). Pada saat yang sama, warga Kota Surakarta memiliki tempat untuk menyuarakan harapan dan impian mereka di ULAS, dan mereka bisa mendapatkan dokumen keuangan resmi di PPID Kota Surakarta.

Dari apa yang dapat kami kumpulkan, pemerintah kota Surakarta, Indonesia, menggunakan penganggaran E dalam upaya untuk mendapatkan hasil maksimal dari teknologi informasi yang terus berkembang. Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen pada Good Governance dengan menunjukkan keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan keterlibatan warga. Kesimpulan Berdasarkan hasil temuan, Simda Terpadu yang dikelola BPPKAD, Bappeda, dan Diskominfo SP Kota Surakarta bertanggung jawab atas pelaksanaan E Budgeting di Pemerintah Kota Surakarta. Adanya kebijakan dan program kegiatan yang disampaikan langsung kepada masyarakat menunjukkan komunikasi yang terbangun antara organisasi perangkat daerah dengan pemerintah dan masyarakat. Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas pelaksanaan E budgeting di setiap organisasi perangkat daerah, namun hal ini kurang ideal karena sifat generik dari struktur SDM. Pengetahuan dan dedikasi bersama para pelaksana kebijakan dan birokrasi untuk meningkatkan implementasi penganggaran E membentuk fondasi di mana disposisi dibangun. E-budgeting mengarah pada pembuatan situs web dengan tujuan menunjukkan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat umum.

4.3 Perbedaan Sebelum dan Sesudah Implementasi E budgeting

Badan publik yang bertugas menyelenggarakan barang publik harus mengutamakan transparansi agar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan anggaran E untuk menunjukkan dedikasinya terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ditemukan bahwa proses penganggaran Pemerintah Kota Surakarta meningkat secara signifikan setelah diperkenalkannya penganggaran E. Dengan menggunakan temuan penelitian, peneliti akan menjelaskan variasi yang diamati dalam praktik. Pertama, ada perbedaan mendasar dalam sistem yang mendasarinya. Kami berada pada titik waktu di mana penerapan teknologi informasi untuk pengelolaan fiskal daerah diamanatkan oleh pemerintah sehubungan dengan globalisasi. Sebelumnya, pemerintah hanya memiliki akses ke sistem tradisional, sehingga semua perencanaan, penganggaran, dan pelaporannya dilakukan secara manual. Kedua, karena E budgeting ada, publik memiliki lebih banyak alasan untuk percaya dan menghormati pemerintahnya. Peran pemerintah sebagai pelayan publik lebih serius. Ketiga, prosedur penganggaran itu sendiri. Penganggaran manual tidak efisien dan memakan waktu karena biayanya yang tinggi dan alur proses yang panjang. Selain itu, memiliki akses pengelolaan keuangan daerah secara elektronik dapat menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan persiapan, mulai dari penganggaran dan perencanaan hingga pelaporan, yang terintegrasi satu sama lain untuk menghemat uang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi E Budgeting pada Pemerintah Kota Surakarta diterapkan melalui Simda Integrated yang dikelola oleh BPPKAD, Bappeda, serta Diskominfo SP Kota Surakarta. Tujuan dibuatnya website sebagai bagian dari E budgeting adalah untuk menampilkan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat luas. Situs web membuatnya mudah untuk berbagi data dengan masyarakat umum. E-Budgeting tidak akan berhasil kecuali sumber daya manusia terkemuka berada di belakangnya. Perencanaan pembangunan wilayah Kota Surakarta merupakan fungsi resmi Pemerintah Kota Surakarta, dan dilakukan dengan partisipasi berbagai kelompok dan individu melalui Musrenbang dan Diskusi Kelompok Terbatas. Dengan demikian, proses tersebut secara keseluruhan dapat membantu Pemerintah Kota Surakarta menjadi lebih transparan dan akuntabel, yang merupakan langkah penting untuk mencapai *good government*.

Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang ingin disampaikan peneliti guna keberlanjutan penilaian E-Budgeting di Pemerintah Kota Surakarta antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Surakarta.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mengimbangi pembaharuan sistem E-Budgeting kedepannya.
3. Melakukan pemeliharaan website transparansi anggaran.
4. Melakukan sosialisasi mengenai layanan transparansi penganggaran untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan serta pengawasan pembangunan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Surakarta, P. K. (2022, September 25). E Budgeting Surakarta. Retrieved from e-budgeting.surakarta.go.id: <https://e-budgeting.surakarta.go.id/web/>
- [2] Surakarta, P. K. (2022, September 25). PPID Kota Surakarta. Retrieved from [ppid.surakarta.go.id: https://ppid.surakarta.go.id/#](https://ppid.surakarta.go.id/#)
- [3] Surakarta, P. K. (2022, September 25). ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Retrieved from [ulas.surakarta.go.id: https://ulas.surakarta.go.id/](https://ulas.surakarta.go.id)
- [4] Andhayani, A. (2020). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: e-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), Hal: 183-193.
- [5] Belinda, P. A., & Costari, N. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, Vol. 1, No. 1, Hal: 58-77.

-
- [6] Khotimah, N., & Astuti, R. S. (2020). Penerapan Sistem E-Budgeting Sebagai Bentuk Pemanfaatan Teknologi pada Era Revolusi Industri 4.0. prosiding Simposium Nasional, 532-547.
- [7] Ningsih, V., Sari, R. N., & Rasuli, M. (2018). Analisis Penerapan E-Planning dan E-Budgeting Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ekonomi*, Volume 26, Nomor 2, Hal: 18-31.
- [8] Prayoga, F. M., & Yuhertiana, I. (2021). Studi Literatur Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Budgeting dalam Sektor Publik. *Journal of Public Sector Innovations*, Vol. 05, No. 2, Hal: 68-79.
- [9] Thio R, R. A., Irianto, G., & Rosidi. (2018). Analisis Implementasi E-Budgeting Dengan Menggunakan Model CIPP Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Sistem Informasi*, Volume 14, Hal: 53-63.
- [10] Wijayanto, H. (2015). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Penerapan E-Budgeting (Dalam Perspektif Teori Good Governance). *IJPA- The Indonesian Journal of Public Administration*, Vol. 1, No. 1, Hal: 72- 88.